

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 15 Juni 2026
Kepala Bapelitbangda

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Harapan kami, Renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Badan Penanggulangan Bencana yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 - 2026.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan analisis kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di Badan Penanggulanga Bencana Daerah Melalui pendekatan partisipatif, kami berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kami percaya bahwa dengan melibatkan semua elemen masyarakat, program-program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja ini, kami mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap program dan kegiatan yang diusulkan telah melalui proses evaluasi dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap rencana dengan integritas dan bertanggung jawab, demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan dan harapan, Amiin.

20 Oktober 2025

Kepala Pelaksana
BPBD Kab. Padang Pariaman



EMRI NURMAN, S.STP., MM
NIP. 19790601 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	44
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	46
2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan Renja	46
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	51
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	52
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	57
3.3. Program dan Kegiatan	60
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	71
BAB V PENUTUP	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) menjadi instrumen penting yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Renja PD mencerminkan komitmen dan rencana setiap perangkat daerah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang spesifik di wilayah mereka. Dokumen ini menjadi landasan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Selain berfungsi sebagai panduan, Renja PD juga merupakan alat kontrol yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renja PD, pemerintah daerah dapat memonitor efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta memperbaiki kekurangan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyusunan Renja PD yang baik dan tepat waktu menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Pentingnya Renja PD juga terlihat dari perannya sebagai dokumen yang mendukung sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keselarasan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terkoordinasi. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan program dan kegiatan di tingkat daerah dapat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Renja PD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi dasar bagi pengalokasian anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD, Renja PD digunakan sebagai acuan untuk menentukan prioritas pendanaan bagi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menjadikan Renja PD sebagai bagian penting dari siklus anggaran pemerintah daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renja PD merinci program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen ini memuat prioritas kegiatan yang menjadi fokus perangkat daerah selama satu tahun anggaran, disertai dengan target capaian kinerja yang diharapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja PD memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja PD juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoordinasikan pelaksanaan program antar-perangkat daerah agar terhindar dari duplikasi kegiatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Renja PD, perangkat daerah perlu memperhatikan berbagai isu strategis yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh wilayahnya. Renja PD harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat serta mencerminkan kebijakan pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, proses penyusunan Renja PD tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan proses konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa dokumen ini dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada.

Renja PD juga berperan dalam mendorong akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Dengan adanya target-target yang jelas dalam Renja PD, perangkat daerah dapat lebih mudah diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result-based management), di mana efektivitas dan efisiensi program pemerintah menjadi ukuran utama keberhasilan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perumusan prioritas program dan kegiatan. Tahap awal dalam proses penyusunan Renja PD adalah melakukan analisis situasi yang mencakup evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta identifikasi masalah yang dihadapi oleh perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja ini menjadi dasar

untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian program yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tahap berikutnya adalah identifikasi isu strategis yang relevan dengan sektor atau bidang yang menjadi tugas pokok perangkat daerah. Isu strategis ini mencakup tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Perangkat daerah perlu memperhatikan perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi daerah, sehingga program yang direncanakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah identifikasi isu strategis, perangkat daerah menetapkan prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Renja PD. Prioritas ini ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program tersebut, serta kesesuaian dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam proses ini, keterlibatan pemangku kepentingan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, sangat penting untuk memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Tahap terakhir adalah penyusunan draft Renja PD yang memuat rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Draft Renja PD ini kemudian dibahas dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah (OPD), serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebelum disahkan. Proses konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar dokumen Renja PD yang dihasilkan benar-benar representatif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Salah satu dokumen utama yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Renja PD harus selaras dengan RKPD untuk memastikan bahwa program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah mendukung prioritas pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain itu, Renja PD juga terkait dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi yang akan ditempuh oleh

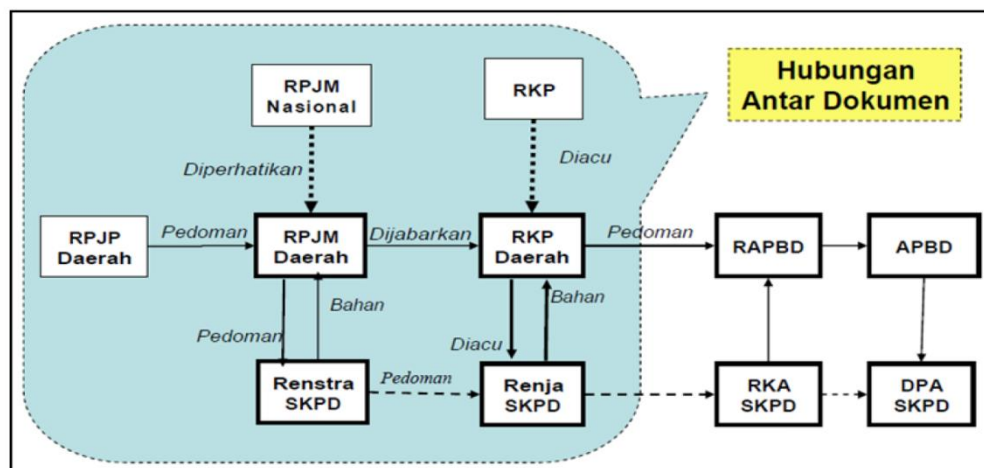
perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Renja PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD, sehingga program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD harus konsisten dengan arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra PD.

Tidak hanya itu, Renja PD juga harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, seperti Renja Kementerian/Lembaga (K/L), serta perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini penting terutama untuk program-program yang melibatkan kerjasama antar-pemerintah daerah atau memerlukan sinergi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, penyusunan Renja PD harus mempertimbangkan berbagai aspek kebijakan, baik yang bersifat lokal maupun nasional, untuk memastikan kesinambungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterkaitan Renja PD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya mencerminkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-tahapan dan tingkat perencanaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan serta untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya dapat digunakan secara optimal. Sinergi yang baik antara Renja PD dan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat Dinas/Badan berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. RPJMD menetapkan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Badan memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah,

sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Badan ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik badan dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memberikan panduan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 menjadi acuan utama bagi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam penyusunan Renja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh badan selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2021-2026 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja badan dalam jangka pendek, sehingga badan dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis badan dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran badan di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini

penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD Perubahan diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja Perubahan PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD Perubahan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman; Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026);
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan OPD, proses penyusunan Renja Perubahan OPD, keterkaitan antara Renja Perubahan OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program

dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- 2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

- c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 3) Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I dan II Tahun 2025

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025 Triwulan I dan II berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100	100	100	%	4.642.549.136	4.500.740.886	96,95
		80	80	100	Nilai			
		100	100	100	%			
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5	14	280%	Orang	85.372.000	78.054.688,00	91,37%
		5	4	80%	Orang			
		29	116	400%	Orang			
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	2	20%	Orang	85.426.000	3.500.000	100

Pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan digunakan untuk melakukan pembayaran perjalanan bimbingan teknis bagi para pimpinan d lingkungan BPBD Kabupaten Padang Pariaman. Pada sub kegiatan tersebut yang melakukan perjalanan dala bimbngan teknis sebanyak 2 orang saja dari target pada renstra yang telah ditetapkan sebanyak 10 Orang.

2.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100	100	100	%	4.642.549.136	4.500.740.886	96,95
		80	80	100	Nilai			
		100	100	100	%			
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		250	470	188%	Surat	385.297.800	382.797.181	99,35
		60	25	42%	Layanan			
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60	15	25	Dokumen	3.500.000,00	3.500.000	100
2	Penyediaan Komponen Instalasi	600	224	37	Paket	7.461.000	7.284.000	97,63

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	316	310	98	Paket	9.000.000	9.000.000	100
4	Fasilitasi Kunjangan Tamu	314	10	3	Laporan	10.000.000,00	7.770.400	77,7
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	455	381	84	Laporan	355.336.800,00	355.242.781	99,97

Pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan digunakan untuk melakukan pembayaran pariwra ataupun berita media cetak maupun elektroik yang menyiarkan kebencanaan yang berkaitan dengan BPBD. Untuk realisasinya sebanyak 15 dokumen dalam bentuk pemberitaan BPBD dalam berbagai media dari target pada renstra yang terah ditetapkan sebesar 60 Dokumen. Realisasi kerja pada sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjangan Tamu, dan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD masing masing tidak mencapai target yang telah ditentukan pada renstra sebelumnya. Hal ini terjadi karena dengan jumlah realisasi tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan di BPBD.

3. Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

N O	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Targe t	Realisas i	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100	100	100	%	4.642.549.136	4.500.740.886	96,95
		80	80	100	Nilai			
		100	100	100	%			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		6	6	100	Dokumen	50.822.000	49.885.205	98,16
		4	4	100	Laporan			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	330	32	10	Dokumen	45.886.610	45.673.580	99,54

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat digunakan untuk melakukan pembayaran alat tulis kantor. Tidak tercapainya capaian target kinerja dikarenakan kebutuhan BPBD telaah terpenuhi dala capaian tersebut.

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100	100	100	%	4.642.549.136	4.500.740.886	96,95
		80	80	100	Nilai			
		100	100	100	%			
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		500	2.000	400	Objek	75.557.000	64.668.582	85,59
		20	80	400	Miliar			
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34	10	29	Unit	3.507.000	3.507.000	100

Pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya digunakan untuk melakukan pembayaran untuk biaya perawatan sarana dan prasaran peralatan evakuasi bencana. Tidak tercapainya capaian kegiatan dikarenakan anggaran yang hanya cukup dalam pemeliharaan 10 unit saja, sehingga dilakukan pemeliharaan pada peralatan yang pling membutuhkan. Dan tidak banyaknya nya perlatan dan sarana prasaran yang membuhkan perawatan dan pemeliharaan.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100	100	100	%	4.642.549.136	4.500.740.886	96,95
		80	80	100	Nilai			
		100	100	100	%			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		6	6	100	Dokumen	50.822.000	49.885.205	98,16
		4	4	100	Laporan			

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	100	Dokumen	27.827.000	27.015.000	97,08
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	100	Dokumen	22.995.000	22.870.205	99,46

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan terealisasi sebesar Rp. 50.822.000 dari jumlah pagu Rp. 49.885.205 dengan capaian 98,16% telah menghasilkan 10 (sepuluh) dokumen kerja Perangkat Daerah yaitu Dokumen RKA SKPD, Dokumen Perubahan RKA SKPD, Dokumen DPA SKPD, Dokumen Perubahan DPA SKPA, Renstra tahun 2021-2026, Renja 2025 dan beberapa dokumen pelaporan LAKIP tahun 2024, LPPD tahun 2024, Keuangan persemester dan Kegiatan Penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran SKPD dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100	100	100	%	4.642.549.136	4.500.740.886	96,95
		80	80	100	Nilai			
		100	100	100	%			
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1	1	100	Laporan	3.144.800.746	3.032.826.347	96,44
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29	29	100	Orang/bulan	3.025.525.746	2.913.576.347	96,30%
2	Penyediaan Administasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100	Dokumen	119.275.000	119.250.000	99,98%

Pada kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang terdiri dari 2 sub kegiatan, yang pertama yaitu Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN . Telah terbayarkan semua gaji beserta tunjangan TPP kepada seluruh ASN yang ada di BPBD Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 29 orang setiap bulannya, sehingga capain keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah 100%. Sedangkan pada sub Penyediaan Administasi Pelaksanaan Tugas ASN telah dibayarkannya honorarium pengelola keuangan BPBD Kabupaten Padang Pariaman selama 12 bulan.

4. Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100	100	100	%	4.642.549.136	4.500.740.886	96,95	
		80	80	100	Nilai				
		100	100	100	%				
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		6	8	133	Buah	870.645.590	864.108.883	99,25%	
		6	9	150	Buah				
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	36	300	Laporan	55.000.000	50.932.437	92,60	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	18	900	Laporan	24.736.500	24.523.750	99,14	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	Laporan	745.022.480	742.979.116	99,73	

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah dilakukan realisasi pembayaran tagihan listrik, biaya telepon dan wifi di kantor BPBD Kabupaten Padang Pariaman, selama 12 bulan. Sehingga terdapat pelaporan sebanyak 36 laporan. Sedangkan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah dilakukannya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 18 unit sesuai dengan target yang ditentukan. Dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor untuk pembayaran gaji tenaga THL selama 12 bulan sehingga terdapat 12 laporan.

b. Program Penanggulangan Bencana Daerah

Program Penanggulangan Bencana terdiri dari 3 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan yang merupakan kegiatan dalam Penanggulangan Bencana dari Pra Bencana, Pada Saat Terjadinya Bencana dan Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman, program ini menyerap dana sebesar Rp. 12.048.153.855 atau 75,66% dari total anggaran sebesar Rp. 15.923.262.841 Ada 1 buah sub kegiatan yang memenuhi target yang diinginkan. Dan terdapat 1 sub kegiatan yang memenuhi target dan 5 sub kegiatan yang melebihi target.

1. Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pencapaian Kinerja				Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Penanggulangan Bencana	60	100	167	Persen	15.923.262.841	12.048.153.855	75,66
		82	100	122	Persen			
		80	80	100	Persen			
	Kegiatan Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana	1	-	0	Dokumen	15.032.850.841	11.237.364.600	75
		1	1	100	Dokumen			
		1	1	100	Dokumen			
1	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	2	2	100	Dokumen	15.032.850.841	11.237.364.600	75

Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota. Pada sub kegiatan ini dilaksanakan pelaksanaan lanjutan realisasi dana hibah dari BNPB. Pada tahun 2023 BPBD Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan dana Hibah dari BNPB dalam upaya rekonstruksi tiga jenis infrastruktur di tiga tempat yang rusak akibat bencana dengan anggaran sebesar Rp. 29.592.026.000. Adapun tiga jenis infrastruktur tersebut yang dilakukan rekonstruksi adalah:

1. Rekonstruksi pembangunan dinding penahan tebing di Jalan Sikayan Ruas Jambak Lubuk Alung.
2. Rekonstruksi pembangunan jembatan pinjauan di Kecamatan Sungai Limau
3. Rekonstruksi pembangunan Bendung/Cekdam Sungai Limau.

Pada tahun 2023 objek infrastruktur Rekonstruksi pembangunan Bendung/Cekdam Sungai Lima tidak dapat diselesaikan karena terjadi pemutusan kontrak, sehingga dilanjutkan pada tahun 2024. Pada tahun 2024 proses rekonstruksi bangunan cek dam sungai limau telah berhasil dilaksanakan dengan realisasi pengerjaannya sebesar 100%.

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	%	4.642.549.136	4.500.740.886	96,95
		80	80	100	Nilai			
		100	100	100	%			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	250	470	188%	Surat	385.297.800	382.797.181	99,35
		60	25	42%	Layanan			
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450	381	84%	Laporan	355.336.800,00	355.242.781	99,97%

2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	%	4.642.549.136	4.500.740.886	96,95
		80	80	100	Nilai			
		100	100	100	%			
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500	2.000	400	Objek	75.557.000	64.668.582	85,59
		20	80	400	Miliar			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6	36	600	Unit	72.050.000	61.161.582	84,89

b. Program Penanggulangan Bencana Daerah

1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penanggulangan Bencana		60	100	167	Persen	15.923.262.841	12.048.153.855	75,66
		82	100	122	Persen			
		80	80	100	Persen			
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		15	16	107	Nagari	253.990.600	242.416.725	95,44
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1	6	600	Nagari	18.988.900	17.733.000	93,39%
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	5	44	880	Kali	303.354.000	302.353.600	99,67%

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan bencana Kabupaten / Kota. Pada tahun 2024 BPBD Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan bantuan dari Bank Dunia dalam bentuk program IDRIP (Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project) yang merupakan upaya peningkatan kapasitas Nagari Tangguh Bencana di 6 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman. Adapun nagari yang dimaksud adalah

1. Nagari Katapiang
2. Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan
3. Nagari Ulakan
4. Nagari Kuranji Hilir
5. Nagari Malai V Suku
6. Nagari Pilubang

Sehingga dengan adanya bantuan dari IDRIP tersebut telah berhasil dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di masing masing Nagari sehingga pada tahun 2024 terbetuk sebanyak 6 dokumen.

Selain itu pada sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan kesiapsiagaan didukung dengan adanya anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) Peruntukan atau Tagging. Adapun bentuk nyata dari kegiatan pelatihan pencegahan dan

mitigas bencana kabupaten/kota in adalah:

- a. Sosialisasi dan Simulasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami dan Banjir di Sekolah -Sekolah dan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Sosialisasi dan pelatihan mitgasi kepada kelompok-kelompok masyarakat.

2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program Penanggulangan Bencana		60	100	167	Persen	15.923.262.841	12.048.153.855	75,66
		82	100	122	Persen			
		80	80	100	Persen			
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1000	21.769	2177	Orang	636.421.400	568.372.530	89,31%
1	Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1000	26.761	2676	Orang	327.497.200	327.494.100	100,00
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten/Kota	50	36	72	Orang	18.925.200	18.921.800	99,98%

Pada Sub kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota digunakan untuk melakukan pembyaran pada honor tenaga TRS atau uang kejadian dala melakukan evakuasi, pertolongaan, dan penyelamatan korban bencana. Dari 1000 korba target yang berhasil diselamatkan BPBD telah berhasil mencapai 26.761 korban bencana yang berhasil dievakuassi, ditolong dan diselamatkan.

Pada Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota digunakan sebagai biaya untuk membiayai perjalanan penyauran logistic kebencanaan kepada pendistribusia Bantuan Logistik Bencana sebanyak 36 (tiga puluh tiga) Paket yang berisi Sembako, Terpal dan Karung tergantung jenis bencana yang terjadi kepada 180 Warga Negara.Untuk peyediaan logistik sendiri BPBD Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan bantuan dari BPBD Provinsi Sumatera Barat.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Jumlah SDM yang cukup
- b. Adanya beberapa SDM yang profesional dan terlatih
- c. Adanya bantuan penyediaan peralatan kebencanaan baik dari Provinsi
Maupun Pusat

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

- a. Luasnya wilayahnya padang pariaman yang berada di kawasan rawan bencana sehingga menyulitkan dalam menyampaikan informasi.
- b. Masih banyak masyarakat yang belum peduli terhadap informasi bencana
- c. Masih kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
- d. Banyaknya jenis ancaman bencana di kabupaten padang pariaman sehingga kebutuhan sarana dan prasarana kebencanaan sangat tinggi
- e. Kurang baiknya kondisi sarana dan prasarana operasional yang tidak memenuhi

2.1.4 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman sangat signifikan ketika Rencana Kerja (Renja) disusun selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan. Pertama, keselarasan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki arah yang jelas dan tujuan yang terukur, sehingga meningkatkan efektivitas dalam pencapaian target. Dengan mengikuti pedoman strategis yang telah ditetapkan, Badan dapat fokus pada prioritas utama yang mendukung visi dan misi jangka menengah, mengurangi risiko penyimpangan dari tujuan awal.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025:

- a. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 sangat bergantung pada

berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya serta kemampuan Badan dalam menyesuaikan strategi. Pertama, jika dalam pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, terdapat keterlambatan atau kendala yang signifikan, implikasinya adalah adanya potensi penurunan capaian target. Program yang tidak berjalan sesuai dengan jadwal dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi, sehingga target yang direncanakan untuk tahun 2025 mungkin harus disesuaikan, baik dari segi volume kegiatan maupun kualitas output yang diharapkan.

- b. implikasi lain yang bisa timbul adalah terkait dengan alokasi sumber daya. Jika Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya di tahun-tahun sebelumnya, maka untuk tahun 2025, akan ada tekanan yang lebih besar untuk mempercepat realisasi program yang tertunda. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan beban kerja dan kebutuhan anggaran yang lebih tinggi di tahun tersebut. Keterbatasan sumber daya pada tahun 2025 juga dapat mempengaruhi kualitas program yang dilaksanakan, sehingga capaian target program Renstra mungkin tidak optimal atau bahkan terancam tidak tercapai.
- c. Monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang berjalan tidak dilakukan secara efektif, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mungkin mengalami kesulitan dalam menilai progres dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Tanpa evaluasi yang tepat, masalah-masalah yang ada dalam pelaksanaan program bisa terakumulasi dan baru terlihat pada akhir periode Renstra. Ini bisa mengakibatkan target capaian di tahun 2025 menjadi tidak realistis, karena kesalahan atau kekurangan dari tahun sebelumnya tidak diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat waktu.
- d. Perubahan kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan, perubahan ekonomi, atau keadaan darurat (seperti pandemi atau bencana alam) juga bisa berdampak besar terhadap capaian target Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025. Jika Badan tidak siap beradaptasi dengan perubahan tersebut, target yang telah ditetapkan di awal periode Renstra mungkin harus direvisi. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam perencanaan dan kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang cepat menjadi kunci agar target capaian program Renstra tetap relevan dan dapat dicapai sesuai dengan harapan.

2.1.5 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Penyusunan Rencana Aksi yang Lebih Detail dan Terfokus

Kebijakan perencanaan harus dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang lebih detail, mencakup target antara, jadwal kegiatan, dan indikator kinerja yang lebih terperinci untuk tahun 2025. Ini akan membantu Badan dalam memetakan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi setiap unit kerja. Rencana aksi yang baik harus mengidentifikasi risiko dan kendala potensial, serta mencakup strategi mitigasi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi hambatan.

b. Peninjauan Ulang Prioritas Program

Tindakan perencanaan berikutnya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas program. Program yang kurang strategis atau tidak mendesak mungkin perlu ditunda atau dialihkan dan difokuskan pada program-program yang lebih berkontribusi terhadap capaian target Renstra. Ini membutuhkan analisis mendalam mengenai dampak setiap program terhadap pencapaian visi dan misi, serta kemampuan program tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal. Dengan menyesuaikan prioritas, Badan bisa lebih fokus pada program yang paling penting untuk mencapai target 2025.

c. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan penguatan sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penerapan M&E yang lebih intensif dan berbasis teknologi, seperti dashboard kinerja atau sistem pelaporan yang real-time, dapat membantu Badan mendeteksi masalah lebih awal. Dengan begitu, Badan dapat mengambil tindakan korektif segera, tanpa harus menunggu masalah membesar dan berdampak pada pencapaian target tahun 2025. Evaluasi berkala ini juga memungkinkan adanya fleksibilitas dalam perencanaan dan penyesuaian program sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

d. Re-alokasi dan Optimalisasi Penganggaran

Dalam hal penganggaran, kebijakan yang perlu diambil adalah melakukan re-alokasi anggaran jika terdapat program-program yang kurang efektif atau sudah tidak sesuai dengan prioritas. Sumber daya harus diarahkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan mendesak dalam mencapai target Renstra.

Selain itu, penganggaran yang lebih efisien harus dilakukan melalui evaluasi rutin terhadap penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya, untuk menghindari pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan memiliki dampak maksimal. Strategi optimalisasi anggaran ini dapat mencakup penghematan di pos-pos tertentu, peningkatan kapasitas SDM, atau pemanfaatan teknologi yang lebih canggih untuk mendukung pelaksanaan program.

Tabel 2.1 (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pencapaian Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun s/d tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2023	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	persentase terpenuhi nya pelayanan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300%
		Nilai SAKIP Perangkat daerah hasil evaluasi inspektorat	A	A	A	A	100	A	A	100%
		Persentase Temuan BPK yang ditinjaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300%
X.X.X.0.1.2 ,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	98%	100	94%	100%	94%	96%	296%	302%

X.X.X.0.1.2,01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	36 Dokumen	600%
X.X.X.012,01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	300%
X.X.X.01.2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
X.X.X.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100%	29 Orang/Bulan	3 Perangkat Daerah	10%
X.X.X.01.2,02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	300%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Pegawai	98%	0	94%	100%	94%	96%	196%	200%

		Perangkat Daerah								
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	-	1 Orang	1 Orang	100%	10 Orang	11 Orang	110%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggara ya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	100%	100	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	300 Paket	100 Buah	600 Paket	148 Paket	25%	600 Paket	848 Paket	141%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	3 Paket	-	0%	3 Paket	3 Paket	75%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	255 Buah	287 Paket	232 Paket	81 %	316 Paket	803 Paket	3.212 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	0 Paket		0%	0 Paket	0 Paket	0%

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Kali	0 Paket	-	0%	0 Paket	0 Paket	0%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30 Dokumen	921 Eksemplar	370 Dokumen	6 Dokumen	0%	60 Dokumen	987 Dokumen	3290%
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket		0%	0 Paket	0	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	390 Porsi	30 Laporan	966	308%	314 Laporan	314 Laporan	3140%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	461 Orang	150 Laporan	621	138 Orang	455 Laporan	1537 Laporan	1707%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen		0%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen		0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Tersedianya Sarana	88%	-	100%	100%	100%	86%	186 %	211%

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah								
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	1 Unit	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	1 Unit	100%
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	1 Unit	100%
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	1 Unit	100%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit	-	10 Unit	0 Unit	0%	10 Unit	10 Unit	90%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	0 Unit	0 Unit	0%	5 Unit	5 Unit	500%
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%

	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	-	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0 Unit	0%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	1 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100	100%	100	100%	100%	300%	300%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	250 Buah	300 Laporan	1.182	394%	330 Laporan	1.762	1762%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	1 Laporan	12 Tagihan	12 Laporan	12	100%	12 Laporan	36 Laporan	36 %

		dan Listrik yang Disediakan								
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13 Unit	1 Laporan	-	0 %	2 Laporan	15 Laporan	15%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	51 Orang/12 Bulan	12 Laporan	200	328%	60 Laporan	311 Laporan	311%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100	100%	100%	300%	300%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	4 Unit	6 Unit	9	150%	6 Unit	19 Unit	3,16%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	13 Unit	8 Unit	-	0%	1 Unit	14 Unit	1,75%

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	2 Unit	2%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	2 Unit	2%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit	10 Unit	34 Unit	1	2%	34 Unit	45 Unit	132%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	0	0%	0 Unit	0 Unit	0%
1.5.3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana	40	103	30	103	294	35	241 Nagari	6025%
		Persentase Jumlah Korban	90%	100%	82%	100	121	85%	285%	316%

		Berhasil di cari, ditolong dan Evakuasi Terhadap Kejadian bencana								
		Persentase Relawan yang ikut Pelatihan	38.83%	24,0	29.12%	-	-	33.98%	57,98%	149%
		Persentase daerah pascabencana yang mendapatkan penanganan Rehabilitasi Rekonstruksi	85%		75%		-	80%	80%	94%
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Informasi/laporan kejadian bencana yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	0%	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis	80.000	13 Lokasi	10	17	170%	120.000 Orang	120.030 Orang	1500%

		Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya								
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase nagari yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	90%	100%	100%	95%	295%	295%
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Lokasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	3%
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	400 Orang	5 Kali	5 Kali	44 Kali	880%	350 Orang	399 Orang	100%
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana	Jumlah laporan pelayanan pusat pengendalian operasi	1 Dokumen	5 Ops/Bulan	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	6 Dokumen	6%

	Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	(Pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggalnya								
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 Unit	28 Unit	37 Unit	16 Unit	43 %	37 Unit	81 Unit	370%
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan	-	1 Kawasan	-	-	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan	21 Orang	-	18 Orang	-	-	30 Orang	30 Orang	142%

	(TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kapasitas Teknis dan Manajerialnya								
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	50 Orang	-	40 Orang	-	-	100 Orang	100 Orang	200%
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300 %	300%
		Persentase sarana dan prasarana kebencanaan dalam keadaan baik	100%	100%	100%	-	-	100%	200%	200%
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	-	1 Laporan	-	-	0 Laporan		0%

	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Kali	-	1 Kali	-		0 Dokumen	0 Dokumen	0%
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	400 Orang	240 Kali Kejadian	5000 Orang			1000 Orang	1240 Orang	310%
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	370 Orang	23 Paket	150 Orang			50 Orang	73 Orang	19%
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	-	1 Laporan	-	-	0 Laporan	0 Laporan	0%
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	0 Dokumen	0 Dokumen	0%

		Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu								
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase ketersediaanny a dokumen regulasi penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100		100%	300%	300%
		Persentase terselesaikanny a dokumen penanggulangan pasca bencana yang tersedia	100%		100%			100%	100%	100%
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraa n Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokume n	-	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen		-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	1 Dokumen		1 Dokumen		-	10 Dokumen	10 Dokumen	1000%

	Bencana Kabupaten/Kota	Penanggulangan Bencana								
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen		1 Dokumen		-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	3 Kegiatan	1 Laporan		-	3 Laporan	6 Laporan	600%
	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	11 Pelaksanaan Jitupasna	6 Dokumen	2 Dokumen	33 %	1 Dokumen	12 Dokumen	12000%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor Perda No 10 Tahun 2016 tentang Struktural Organisasi dan SOTK, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana.

Berdasarkan Perda Padang Pariaman Nomor 05 Th 2010 tentang Pembentukan Organisasi BPBD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan peta rawan bencana.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2021-2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- a). Tujuan : 1 Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel
2 Penguatan Layanan Kebencanaan
- b). Sasaran : 1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Meningkatnya pelayanan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan
3. Meningkatkan pelayanan penanganan dalam keadaan darurat bencana.
4. Meningkatnya pelayanan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Secara Kualitas dan Kuantitas.
- c). Indikator Kinerja : 1. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Inspektorat
2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
4. Persentase sektor perumahan dan permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

- a. Tingkat Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari 4 indikator terdapat 1 indikator yang belum mencapai target 100%, antara lain :
 1. Persentase sektor perumahan dan permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor yang mendapatkan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain :
 1. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan rekonstruksi cekdam di sungai limau ini adalah karena ketidaksanggupannya atau kurang profesionalnya kontraktor atau pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga terjadinya pemberian surat peringatan SCM 1,2 dan 3.

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan Renja

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review, diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2025

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Indikator Berdasarkan Kemendagri 050-5889	Satuan	Target Rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2023, s.d 2026 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah)				Realisasi capaian kinerja perangkat daerah sampai dengan rege perangkat daerah Tahun Lalu n-2 Tahun 2024				Target Kinerja dan Anggaran Rerje Perangkat Daerah Tahun berjalan yang direvisasi (Tahun 2025)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPMD yang direvisasi				Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran rerje perangkat daerah tahun yang di revisasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPMD Tahun 2025)				Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah penanggung jawab	
				K	Rp	%	1	K	Rp	%	2	K	Rp	%	3	K	Rp	%	4	K	Rp	%	1-3=127/04=100%	K	Rp	%	1-4=6+12	K	Rp	%	15		
BADAN PENGELOLA ANG		58.166.546.653			36.736.872.843			6.468.976.705			1.459.413.624			1.459.413.624			1.459.413.624			1.459.413.624		13=127/04=100%		14=6+12		15=145+100%							
Program Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LRA-SADP yang dilakukang	%		34.610.291.456	100	%	15.054.751.114	100	%	5.769.984.405	100		1.459.413.624	%	1.459.413.624	25,21%	100	16.514.164.738	49%												BPBD		
Pengembangan, Penganggaran, dan Realisasi Kinerja Perangkat daerah	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%		A	-	A	-	81								#DIV/0!	A	-													BPBD		
	Persentase Tuntutan BPRK yang ditindaklanjuti	%		100	%	-	100	%	-	100	%	-	100	%	-	100	%	-	100	%	-	50%	0,00%	209	277.948.725	9%	42%					BPBD	
	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja perangkat daerah	Laporan						4	Laporan		3		-	3			75%															BPBD	
	Jumlah Dokumen Rerje, RPA, DPA, RPA P, DPAP, PVP, Perencanaan Daerah	Dokumen	36	476.950.000		11	Dokumen	178.516.750.00	6	Dokumen	30.007.000	3		3	0	-	50%	#REF!		178.516.750	0%	37%										BPBD	
	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD, laporan keuangan, LAPK, LPKD, laporan realisasi anggaran (kinerja pertubuan) yang disusun	Laporan	24	180.726.088		7	Dokumen	99.431.975.00	4	Laporan	25.167.000	3		3	0	-	75%	0,00%	7	99.431.975	0%	55%										BPBD	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perumtng undangan	Laporan		10.199.045.668	1		7.037.040.326,92	1	Laporan	4.481.923.235	1		1.312.551.194	%	1.312.551.194	0%	29,29%	1	9.249.591.521	0%	61%											BPBD	
Penyediaan Capaian Anggaran ASN	Gag dan Tunjangan ASN yang dibayarkan selama 14 Bulan	Orang/bulan	1	14.485.912.868	29	Perangkat Daerah	7.601.480.326,92	29	Orang/bulan	4.362.673.235	49		1.312.551.194		0	1.312.551.194	0%	30,09%	29	8.014.031.521	0%	62%										BPBD	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pembayaran Honorarium PAKPAPPTK dan Benda yang dibayarkan	Dokumen	72	713.132.800		21	Dokumen	335.560.000.00	12	Dokumen	119.250.000	-	0	-	0	0,00%	12	335.560.000	0%	47%												BPBD	
Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	Orang	5	170.000.000		5	Orang	-	5	Orang	135.428.000	-	-	-	-	0,00%	5		0%	0%												BPBD	
	Jumlah ASN yang terfasilitasi gug berkala	Orang																															
	Jumlah SDP ASN	Orang																															
	Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	Orang																															
Pengadaan Pakelan Dinas beserta Albul																																	
Penyediaan Fasilitas	Jumlah Aparatur BPBD yang dilengkapi Binaht, Sotifikasi dan Work shop	Orang	60	170.000.000		%		10	Orang	55.028.000						0,00%					0%	0%											BPBD
Administrasi Lintan Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	Surat		2.138.733.100	412	%	1.395.445.597,00	250	Surat	320.829.700		-	%	-	-	0,00%	250	1.395.445.597	0%	65%													BPBD
	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi	Layanan						60	Layanan							-																	
Penyediaan Fasilitas	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Peningkatan yang disediakan	Paket	3600	180.000.000		824	Buah	34.540.000.00	600	Paket	5.461.000			-	Buah	0	0%	0,00%	600	34.540.000	0%	19%											BPBD
Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Fasilitas dan Peningkatan Kantor yang disediakan	Paket	18	180.000.000				26.840.000		Paket				-	#DIV/0!	0,00%	0		0%	0%												BPBD	
Penyediaan Fasilitas Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Fasilitas Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1816	116.525.700	564		Buah	42.041.500.00	316	Paket	9.000.000		0	-	0	0,00%	316	42.041.500	0%	36%													BPBD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket								Paket				-	#DIV/0!																		
Penyediaan Barang Penggantian yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang disediakan	Paket					Kali	10.000.000.00		Paket			Kali	-	#DIV/0!	0	0	0,00%	0	10.000.000	#DIV/0!	100%											
Penyediaan Bahan Baku surat kabar, Majalah dan Buku Perundang-Undangan yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Baku surat kabar, Majalah dan Buku Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	8640	48.000.000	78		Dokumen	24.640.000.00	60	Dokumen	3.500.000.00		0	-	0	0,00%	60	24.640.000	0%	51%													BPBD
Penyediaan Bahan/Material yang disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket								Paket				-	#DIV/0!																		
Penyediaan Fasilitas Makan dan Minuman Tamu Rapat-rapat Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Fasilitas Makan dan Minuman Tamu Rapat-rapat Kantor yang disediakan	Laporan	1884	93.820.500	322		Laporan	51.710.850.00	314	Laporan	10.000.000.00		0	-	0	0,00%	314	51.710.850	0%	55%													BPBD
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Koordinasi Luar Daerah dan Dalam Daerah yang dilaksanakan	Laporan	2730	1.520.386.800	730		Laporan	1.232.513.247.00	455	Laporan	266.228.700.00		0	-	0	0,00%	455	1.232.513.247	0%	81%													
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!																		
Pengembangan Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					Dokumen			Dokumen				-	#DIV/0!													</					

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit							-	Unit									-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Berat yang disediakan	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit							-	Unit									-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat tak bermotor yang disediakan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit							-	Unit									-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang disediakan (Meja, Kursi Kerja, Lemari Asip dll)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	193		593.595.750				-	Paket									-	#DIV/0!			-	0%			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					28.400.000,00	5	Unit										-	#DIV/0!			28.400.000	#DIV/0!			
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap yang disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit							-	Unit									-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit							-	Unit									-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							-	Unit									-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit							-	Unit									-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6		60.000.000				-	Unit									-	#DIV/0!			-	0%			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia		Buah		10.646.240.850	106		4.887.188.197,00	6	Buah	724.696.470	6	Buah	146.862.430	100	%	146.862.430	1667%	20,27%		106	5.034.050.627	0%	47%	BPBD			
	Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan		Buah						6	Buah		6	Buah															
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Asip surat yang diarsipkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1884		196.406.250	358	Buah	134.063.828,00	330	Laporan		40.016.250		-	0	-	0%	0,00%		330	134.063.828	0%	68%	BPBD			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72		1.780.183.600	61	Tagihan/Tahun	648.928.455,00	12	Laporan		60.000.000	3		10.662.430	3	0	10.662.430	25%	17,77%	15	659.590.885	0%	37%	BPBD		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki/ervse	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	91		105.251.000	20	Unit / Tahun	65.313.750,00	2	Laporan		24.083.100		-	0	-	0%	0,00%		2	65.313.750	0%	62%	BPBD			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Swakelola yang dibayarkan selama 12 Bulan dan Asuransi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	356		8.564.400.000	69	Orang/12 Bulan	4.038.882.164,00	60	Laporan		600.597.120	27		136.200.000	27	Orang / 6 Bulan	136.200.000	45%	22,68%	87	4.175.082.164	0%	49%	BPBD		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah objek aset yang terkelola		Objek		3.515.000.000	2000		Objek	557.128.268,00	500	Objek	71.933.000					-	%	-	0%	0,00%	500	557.128.268	0%	16%	BPBD		
	Jumlah total nilai aset		Miliar			80		Miliar		20	Miliar						-		0%		20							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	36		955.000.000	37	Unit / Tahun	307.831.603,00	6	Unit		67.950.000		-	0	-	0%	0,00%		6	307.831.603	0%	32%	BPBD			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	Unit	48		835.000.000		Unit / Tahun	187.762.755,00		Unit				-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		0	187.762.755	0%	22%	BPBD			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pembayaran untuk Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		700.000.000	1			1	Unit							-	0%	#DIV/0!	1	-	0%	0%	BPBD			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembayaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	204		1.025.000.000	42	Unit / Tahun	61.533.910,00	34	Unit				-	Unit		-	0%	#DIV/0!	34	61.533.910	0%	6%	BPBD			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembayaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembayaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit								Unit							-	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!						
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Unit								Unit	3.983.000,00																
Program Penanggulangan Bencana	Persentase nagari yang terpapar dan tersebarluasnya informasi potensi bencana		%		24.156.255.197	60	Nagari	21.682.121.729,00	60	%	678.992.300	10					Nagari	-	0,00%		60	21.682.121.729	0%	90%	BPBD			
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		%			82	%	-	82	%		100					%		0%	#DIV/0!	82	-	#DIV/0!					

	Persentase sektor perumahan dan permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor yang mendapatkan penanganan rehabilitasi konstruksi pascabencana		%			80			-	80	%			30				%		0%	#DIV/0!	80	-	#DIV/0!		
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang terpasang dan tersebar luasnya informasi potensi bencana		Nagari		2.681.057.428	103	Nagari	193.788.440,00	103	Nagari	-	15					%	-	0%	#DIV/0!	103	193.788.440	0%	7%	BPBD	
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian resiko bencana yang terbentuk	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	6	1.381.572.069			-	Dokumen									-	#DIV/0!		-	0%				
	Peningkatan penyusunan kajian risiko bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana (KLHS)							-										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!				
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah lokasi yang dilaksanakannya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	60	1.299.485.359		Lokasi	193.788.440,00	Orang							-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	193.788.440	0%	15%	BPBD	
	Jumlah Waktu publikasi dan informasi tentang kebencanaan melalui media cetak dan media elektronik (koran, paritawa, koran, radio, media online, elektronik)							-								-		-	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!		BPBD		
	Jumlah papan informasi kebencanaan yang terpasang seperti Balihoo, Spanduk, Pamflet di wilayah rawan bencana		103					-								-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!		BPBD	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase nagari yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah nagari yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Nagari		10.879.700.271	15	Nagari	1.802.607.017,00	15	Nagari	212.488.900	2	Nagari			%	-	0%	#REF!	15	1.802.607.017	0%	17%	BPBD		
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah nagari tangguh bencana yang terbentuk	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	7	1.972.157.114	7	Nagari	203.271.710,00	1	Dokumen	8.989.100					-	0	-	0%	#REF!	1	203.271.710	0%	10%	BPBD	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	30	919.636.195	1.130	Kali Kegiatan	760.673.425,00	150	Orang	199.999.800	50	Orang			50	0	-	33%	#REF!	200	760.673.425	0%	83%	BPBD	
	Jumlah pelatihan dan Pendidikan Kebencanaan di Nagari			6				-										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!				
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah operasional kesiapsiagaan posko bencana yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	6			Ops/Tahun	105.487.200,00	Dokumen							-	Ops/6 Bulan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	105.487.200	0%	7%	BPBD	
	Jumlah operasional kesiapsiagaan Anggotanya yang dilaksanakan		257		1.412.090.459,77			-								-	Ops/6 Bulan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!		BPBD	
	Jumlah kegiatan operasional dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana		15					-								-	Ops/6 Bulan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!		BPBD	
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan yang terpeliharanya secara rutin peralatan bencana, repeater biaya sewa tanah repeater dan penggantian rutin komponen EWS (sirene bunyung)	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	222			Unit/Tahun	391.213.363,00	Unit		3.500.000					-	0	-	#DIV/0!	0,00%	0	391.213.363	0%	16%	BPBD	
	Jumlah alat komunikasi dan peringatan dini yang disediakan (EWS, Repeater, HT, Radio RIG)			18				-								-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	#DIV/0!		BPBD	
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Risiko Bencana yang dikelola	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	30	425.211.299			-	Dokumen									-		#DIV/0!		-	0%			
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Dokumen Penguatan Kapasitas Kawasan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	6 Dokumen	1.103.281.325			-	Kawasan									-		#DIV/0!		-	0%			
	Peningkatan pengelolaan risiko bencana terhadap berbagai jenis ancaman bencana							-										-		#DIV/0!		-	#DIV/0!			
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah latihan yang diikuti Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	8	745.738.340			-	Orang									-		#DIV/0!		-	0%			
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang dibuat	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	6	1.166.129.532			-	Dokumen									-		#DIV/0!		-	0%			
Pelayanan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah gladi kesiapsiagaan terhadap bencana yang dipersiapkan	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	6				14.170.000,00	Orang							-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	14.170.000	#DIV/0!		BPBD	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang terbentuk	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	6	613.595.055			-	Dokumen									-		#DIV/0!		-	0%			
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Ditangani		Orang		3.239.578.585	1000	Orang	2.169.285.778,00	1000	Orang	226.503.400	4	Orang			%		-	0%	#REF!	1000	2.169.285.778	0%	67%	BPBD	
	Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan dalam keadaan baik		Unit				Unit		100	Unit		144	Unit													

Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah inovesl/apikasi tentang kebencanaan di BPBD yang disediakan	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	18 Inovasi			-	Laporan									-	#DIV0!		-	#DIV0!			
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Waktu yang dibutuhkan dalam penanganan darurat bencana	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lam a 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokume n	14 Menit		221.956.630,00	Dokumen										-	#DIV0!	221.956.630	#DIV0!				
Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian yang ditangani	Jumlah Korban yang Berhasil Diemuka n, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang		1.671.273.303	27.761	Kali Kejadian	1.986.168.068,00	1000	Orang	211502.000	4	Orang		4	0	-	0%	#REF!	1004	1.986.168.068	0%	119%	BPBD
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	2100	1.568.305.282	86	Paket	183.117.710,00	50	Orang	15.001.400			-	0		-	0%	#REF!	50	183.117.710	0%	12%	BPBD
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	9438			-	Laporan									-	#DIV0!		-	#DIV0!			
Respon cepat bencana alam epidem/wabah penyakit	Waktu yang dibutuhkan dalam penanganan darurat bencana non alam epidemi/ wabah penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KL.B dan Epidemiologi Terpadu	Dokume n	1			-	Dokumen						-			-	#DIV0!		-	#DIV0!		BPBD	
Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen penanggulangan pasca bencana		Dokume n		7.355.918.914	1	Dokumen	17.516.440.494,00	1	Dokumen	240.000.000				%		-	-	-	1	17.516.440.494	0%	238%	BPBD
	Jumlah Dokumen Penganggaran Pra Bencana yang tersusun		Dokume n					Dokumen	1	Dokumen		1	Dokumen											
	Jumlah Dokumen Pemulihan Kondisi Fisik dan Non Fisik Penanggulangan Pasca Bencana		Dokume n					Dokumen	1	Dokumen														
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah dokum en regulasi penanggulangan bencana yang disusun	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokume n	6	1.285.337.948	-		Dokumen						-			-	#DIV0!	#DIV0!	0	3.535.000	0%	0%	BPBD
Penguatan Kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penguatan kelembagaan bencana	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokume n	6	1.285.260.023	-	Kali Kegiatan	92.122.800,00		Dokumen				-			-	#DIV0!	0	92.122.800	0%	7%	BPBD	
Kerjasama antar Lembaga dan Mitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga dan kemitraan didalam penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Mitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokume n	60	1.157.292.292			Dokumen									-	#DIV0!		-	0%			
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Sistem Informasi Kebencanaan yang dapa dikelola dan di manfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokume n	6	771.403.077	-		Dokumen						-			-	#DIV0!	#DIV0!	0	77.932.510	0%	10%	BPBD
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Birwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	18	1.542.888.615	-	Kegiatan	106.901.900,00		Laporan				-	Kegiat an		-	#DIV0!	#DIV0!	0	106.901.900	0%	7%	BPBD
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah database rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang tercatat	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	Dokume n	6925	1.313.736.960	4	Unit	11.565.155.919,00	2	Kegiatan	240.000.000			-	0		-	0%	0,00%	2	11.565.155.919	0%	880%	BPBD
	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan JITU PASNA	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)		2	-									-			-	#DIV0!	#DIV0!	0	-	#DIV0!	BPBD	
	Jumlah Lokasi Bencna yang ditanggulangi			38	-			17.235.948.284,00						-			-	#DIV0!	#DIV0!	0	17.235.948.284	#DIV0!		BPBD
	Jumlah dokumen pembuatan zonasi kerentanan bangunan terhadap bahaya gempa (400 titik)			6	-			-						-			-	#DIV0!	#DIV0!	0	-	#DIV0!	BPBD	
	Jumlah Dokumen penyusunan database Peta GIS rawan bencana			-	-			-						-			-	#DIV0!	#DIV0!	0	-	#DIV0!	BPBD	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk Badan, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat Badan perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

Tabel 3.1
Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Padang Pariaman Maju dan Sejahtera
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tabel 3.2
Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	Tema	Tema
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi dan hak azazi manusia	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosol kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
Tema		Tema	Tema
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
		Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
3.	Prioritas Nasional 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 2. Penguatan Infrastruktur Publik yang ramah lingkungan dengan memperhatikan tata ruang wilayah
		Prioritas 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Prioritas 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Prioritas 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Prioritas 4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Berketahanan Sosial

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	Tema	Tema
	olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Prioritas 3. Penguatan Ketahanan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan
		Prioritas 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
		Prioritas 6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
7.	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Prioritas 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Prioritas 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	Prioritas Pembangunan RKPD Padang Pariaman Tahun 2025
	Tema	Tema	Tema
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Prioritas 1. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang

yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah "Menurunnya resiko bencana" dengan Indikator Tujuan "**Indeks Resiko Bencana**"

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,01
2	Menurunnya resiko bencana	Indeks Resiko Bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase nagari yang mendapatkan layanan kesiapsiagaan bencana	Persen	65
			Meningkatnya kecepatan dan efektivitas penanganan darurat bencana di daerah	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	Persen	100
			Meningkatkan mutu penanggulangan pascabencana	Persentase penanggulangan pasca bencana	Persen	100

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman,

Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah "Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang maju dan sejahtera melalui pengembangan ekonomi lokal dan infrastruktur berkelanjutan," maka program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, dinas perlu melakukan penyesuaian secara terus-menerus dengan prioritas yang ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

2. Pencapaian SDGs

Sebagai bagian dari komitmen, Kabupaten Padang Pariaman juga perlu memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pencapaian kesejahteraan untuk semua. Dalam konteks ini, program dan kegiatan Dinas tahun 2025 harus dirancang untuk mendukung beberapa tujuan SDGs, seperti meningkatkan kualitas pendidikan (Goal 4),

memastikan akses air bersih dan sanitasi (Goal 6), serta menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8). Setiap program yang dirancang perlu mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap target SDGs di Kabupaten Padang Pariaman.

Program dan kegiatan dinas harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs ini, baik melalui peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi berkelanjutan, maupun perlindungan lingkungan.

3. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah salah satu fokus utama pemerintah daerah yang harus diprioritaskan dalam perencanaan program dan kegiatan. Program yang dirancang oleh Dinas harus berkontribusi langsung terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman. Ini dapat berupa program-program yang mendukung pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial yang terarah. Selain itu, pengembangan program ekonomi produktif seperti pemberdayaan UMKM dan pelatihan keterampilan kerja juga menjadi faktor penting dalam strategi pengentasan kemiskinan di daerah.

Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan di tingkat daerah, termasuk dalam menyusun program dinas. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman harus dihadapi melalui program yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat miskin. Beberapa contoh program yang relevan adalah:

- **Pemberdayaan ekonomi masyarakat:** Program pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan berwirausaha, yang kemudian diikuti dengan pemberian akses modal dan dukungan pasar.
- **Bantuan sosial terarah:** Penyusunan program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan tunai atau bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, sehingga dapat langsung meringankan beban ekonomi mereka.
- **Pengembangan infrastruktur yang mendukung ekonomi masyarakat:** Pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal, seperti

pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, untuk meningkatkan akses masyarakat miskin ke pasar dan layanan publik. Pengentasan kemiskinan tidak hanya membantu masyarakat secara langsung tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial daerah.

4. Pencapaian NSPK dan SPM

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah instrumen yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan kualitas pelayanan dasar di daerah. Dinas harus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dirumuskan di tahun 2025 telah memenuhi dan mematuhi NSPK dan SPM yang berlaku. Pencapaian NSPK dan SPM terkait dengan sektor-sektor layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, dan sosial. Program-program Dinas harus diarahkan untuk memenuhi standar tersebut, seperti memastikan tersedianya layanan kesehatan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah atau memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak usia sekolah di Kabupaten Padang Pariaman.

5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi daerah

Pendayagunaan potensi ekonomi lokal adalah faktor kunci dalam menyusun program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman. Setiap program dan kegiatan yang dirumuskan harus didasarkan pada potensi daerah, baik di sektor pertanian, pariwisata, perikanan, maupun sektor lainnya yang memiliki peluang untuk berkembang. Contohnya, jika Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar di sektor pariwisata alam, maka program-program yang dirancang harus mencakup pengembangan destinasi wisata, infrastruktur pendukung pariwisata, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi di sektor tersebut. Begitu juga dengan sektor agribisnis dan perikanan, yang bisa dikembangkan melalui program peningkatan teknologi pertanian, akses pasar, dan dukungan modal bagi petani dan nelayan lokal.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, perencanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2025 dapat disusun secara strategis, efektif,

dan berdampak nyata. Ini memastikan bahwa program yang dirancang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional dan tujuan pembangunan global, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

- b.** Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 maka dirumuskanlah rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 (TC 33)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

Kode (Kepmendagri 050-3708)					Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Rencana Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
-1					-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
Badan Penanggulangan Bencana Daerah							Padang Pariaman		6.421.870.719				5.200.000.000
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	Padang Pariaman	100%	5.742.875.819	DAU		100%	4.984.785.079
						Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		83				86	
						Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti		100%				100%	
X	XX	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	Padang Pariaman	6 Dokumen	56.007.000	DAU		6 Dokumen	40.000.000
						Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah		4 Laporan				4 Laporan	
X	XX	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang Pariaman	6 Dokumen	30.007.000	DAU		6 Dokumen	22.000.000
X	XX	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang Pariaman	4 Laporan	26.000.000	DAU		4 Laporan	18.000.000
X	XX	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	Padang Pariaman	1 Laporan	4.481.923.235	DAU		1 Laporan	4.220.000.000
X	XX	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Pariaman	30 Orang/ Bulan	4.362.673.235	DAU		30 Orang/ Bulan	4.100.000.000
X	XX	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Padang Pariaman	12 Dokumen	119.250.000	DAU		12 Dokumen	120.000.000
X	XX	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	Padang Pariaman	14 Orang	87.486.414	DAU		14 Orang	1.000.000
						Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	Padang Pariaman	4 Orang				4 Orang	

						Jumlah SKP ASN	Padang Pariaman	80 Orang				80 Orang	
						Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	Padang Pariaman	80 Orang				80 Orang	
X	XX	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Padang Pariaman	55 stel	80.000.000				
X	XX	1	2,05	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Padang Pariaman	1 Orang	7.486.414	DAU		10 Orang	1.000.000
X	XX	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	Padang Pariaman	250 Surat	320.829.700	DAU		250 Surat	138.185.079
						Jumlah pelayanan yang terfasilitasi		60 Layanan				60 Layanan	
X	XX	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Padang Pariaman	300 Paket	5.461.000	DAU		300 Paket	3.000.000
X	XX	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Padang Pariaman	4 Paket	26.640.000	DAU		4 Paket	15.000.000
X	XX	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Padang Pariaman	25 Paket	9.000.000	DAU		25 Paket	3.000.000
X	XX	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Padang Pariaman						-
X	XX	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Padang Pariaman						-
X	XX	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Padang Pariaman	30 Dokumen	3.500.000	DAU		30 Dokumen	1.000.000
X	XX	1	2,06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Padang Pariaman						-
X	XX	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Padang Pariaman	10 Laporan	10.000.000	DAU		10 Laporan	5.000.000
X	XX	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Pariaman	90 Laporan	266.228.700	DAU		90 Laporan	111.185.079
X	XX	1	2,06	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Padang Pariaman						-
X	XX	1	2,06	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Padang Pariaman						-
X	XX	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	Padang Pariaman			DAU			

X	XX	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Padang Pariaman			DAU			
X	XX	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Padang Pariaman			DAU			
X	XX	1	2,07	3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Padang Pariaman			DAU			
X	XX	1	2,07	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Padang Pariaman			DAU			
X	XX	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Padang Pariaman			DAU			
X	XX	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Padang Pariaman			DAU			
X	XX	1	2,07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Padang Pariaman			DAU			
X	XX	1	2,07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Padang Pariaman			DAU			
X	XX	1	2,07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Padang Pariaman			DAU			
X	XX	1	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Padang Pariaman			DAU			
X	XX	1	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Padang Pariaman			DAU			
X	XX	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	Padang Pariaman	8 jasa	724.696.470	DAU		8 jasa	527.600.000
						Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan		9 jasa				9 jasa	
X	XX	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang Pariaman	1 Laporan	40.016.250	DAU		1 Laporan	25.000.000
X	XX	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Padang Pariaman	1 Laporan	60.000.000	DAU		1 Laporan	40.000.000
X	XX	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Padang Pariaman	1 Laporan	24.083.100	DAU		1 Laporan	15.000.000
X	XX	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Padang Pariaman	1 Laporan	600.597.120	DAU		1 Laporan	447.600.000
X	XX	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	Padang Pariaman	500 Objek	71.933.000	DAU		500 Objek	58.000.000
						Jumlah total nilai aset		20 M				20 M	
X	XX	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Padang Pariaman	6 Unit	67.950.000	DAU		6 Unit	50.000.000

					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
X	XX	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Padang Pariaman						
X	XX	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1 Unit	3.983.000	DAU		1 Unit	8.000.000
X	XX	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Padang Pariaman						
X	XX	1	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Padang Pariaman						
X	XX	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Padang Pariaman						-
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana	Padang Pariaman	65%	678.994.900	DAU		65%	215.214.921
						Persentase jumlah korban berhasil di cari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana		90%				90%	
						Persentase daerah pascabencana yang mendapatkan penanganan Rehabilitasi Rekonstruksi		85%				85%	
1	5	3	2,01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana	Padang Pariaman	103 Nagari	0	DAU		103 Nagari	5.000.000
1	5	3	2,01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Padang Pariaman						
1	5	3	2,01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Padang Pariaman	200 Orang		DAU		200 Orang	5.000.000
1	5	3	2,02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase nagari yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Padang Pariaman	100%	212.491.500	DAU		100%	20.000.000

						Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Padang Pariaman	100%		DAU		100%	
1	5	3	2,02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Padang Pariaman	1 Dokumen	8.989.100			1 Dokumen	5.000.000
1	5	3	2,02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Padang Pariaman	1 Kawasan	200.002.400			200 Orang	5.000.000
1	5	3	2,02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelayanan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggalnya	Padang Pariaman						
1	5	3	2,02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan yang terpeliharanya secara rutin peralatan bencana, repeater, biaya sewa tanah repeater dan penggantian rutin komponen EWS (sirine tsunami)	Padang Pariaman	10 Peralatan	3.500.000			10 Peralatan	10.000.000
1	5	3	2,02	5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Padang Pariaman						
1	5	3	2,02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Padang Pariaman						
1	5	3	2,02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Padang Pariaman						
1	5	3	2,02	9	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Padang Pariaman						
1	5	3	2,02	10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Padang Pariaman						
1	5	3	2,02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Padang Pariaman						
1	5	3	2,03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Ditangani	Padang Pariaman	20.000 Jiwa	226.503.400	DAU		20.000 Jiwa	160.214.921
1	5	3	2,03	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Padang Pariaman			DAU			
1	5	3	2,03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam	Padang Pariaman			DAU			

						berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat							
1	5	3	2,03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Padang Pariaman	400 Orang	211.502.000	DAU		200 Orang	150.214.921
1	5	3	2,03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Padang Pariaman	370 Orang	15.001.400	DAU		200 Orang	10.000.000
1	5	3	2,03	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Padang Pariaman			DAU			
1	5	3	2,03	6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Padang Pariaman			DAU			
1	5	3	2,04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen penanggulangan pasca bencana	Padang Pariaman	1 Dokumen	240.000.000	DAU		1 Dokumen	30.000.000
						Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal		100%				100%	
						Jumlah Dokumen Pemulihan Kondisi Fisik dan Non Fisik Penanggulangan Pasca Bencana		1 Dokumen				1 Dokumen	
1	5	3	2,04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Padang Pariaman						
1	5	3	2,04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Padang Pariaman						
1	5	3	2,04	3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Padang Pariaman						
1	5	3	2,04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Padang Pariaman						
1	5	3	2,04	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Padang Pariaman						
1	5	3	2,02	7	Bimbingan Teknis Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Padang Pariaman						

1	5	3	2,02		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Padang Pariaman						1 Dokumen	30.000.000
								1 Kegiatan	240.000.000					

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								6.415.299.247,00	6.468.976.705,00	6.062.252.155,00	-353.047.092,00						5.662.022.48 0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHA N WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.415.299.247,00	6.468.976.705,00	6.062.252.155,00	-353.047.092,00							5.662.022.48 0,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KETENTERAMA N DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGA N MASYARAKAT							6.415.299.247,00	6.468.976.705,00	6.062.252.155,00	-353.047.092,00							5.662.022.48 0,00	
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				100 83	100 83	5.503.804.847,00	5.789.984.405,00	5.544.181.255,00	653.665.788,00						100 86 100	5.052.906.63 0,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah				4 Lapora n 6 Dokum en	4 Lapora n 6 Dokum en	73.200.000,00	55.174.000,00	33.681.000,00	-39.519.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	BPBD	4 laporan 6 Dokumen	55.167.080,0 0	BADAN PENANG GU LANGAN BENCAN A DAERAH
	1.05.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokum en	6 Dokum en	29.137.000,00	30.007.000,00	17.859.000,00	-11.278.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		6 Dokumen	29.998.000,0 0	BADAN PENANG GU LANGAN BENCAN A DAERAH

1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	4 Laporan	44.063.000,00	25.167.000,00	15.822.000,00	-28.241.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		4 Laporan	25.169.080,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan					1 Laporan	1 Laporan	3.653.396.807,00	4.481.923.235,00	4.437.883.235,00	784.486.428,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	BPBD	1 Laporan	4.209.800,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	3.518.946.807,00	4.362.673.235,00	4.362.673.235,00	843.726.428,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		29 Orang/bulan	4.100.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	12 Dokumen	134.450.000,00	119.250.000,00	75.210.000,00	-59.240.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		12 Dokumen	109.800.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat Jumlah SKP ASN Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP					29 Orang 5 Orang	29 Orang 5 Orang	135.428.000,00	135.428.000,00	66.000.000,00	-69.428.000,00			-	-	BPBD	5 Orang 5 Orang 29 Orang	1.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 0	0 0	80.400.000,00	80.400.000,00	66.000.000,00	-14.400.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-				BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	55.028.000,00	55.028.000,00	0,00	-55.028.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		10 Orang	1.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan				250 Surat 60 Layanan	250 Surat 60 Layanan	342.389.700,00	320.829.700,00	260.794.900,00	-81.594.800,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	BPBD	250 Surat 60 Layanan	163.103.400,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				300 Paket	300 Paket	5.461.000,00	5.461.000,00	5.461.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		300 Paket	3.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	51.000.000,00	26.640.000,00	2.900.000,00	-48.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		4 Paket	11.327.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah				25 Paket	25 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman	DANA ALOKASI	-	5. Peningkatan Kualitas		25 Paket	3.020.000,00	BADAN PENANGGU

			Tangga yang Disediakan										an, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel					LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	30 Dokumen	4.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		30 Dokumen	1.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	

															transparan dan akuntabel					
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		10 Laporan	5.005.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	90 Laporan	262.928.700,00	266.228.700,00	234.933.900,00	-27.994.800,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		90 Laporan	139.751.400,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	BPBD		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

																5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel					
1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																				
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																				
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																				

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENANGGU LANGGAMBENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENANGGU LANGGAMBENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENANGGU LANGGAMBENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENANGGU LANGGAMBENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENANGGU LANGGAMBENCANA DAERAH

																Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia				6 Buah	6 Buah	1.178.157.340,00	724.696.470,00	707.989.120,00	-470.168.220,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	BPBD	6 Buah 6 Buah	593.987.150,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	42.672.100,00	40.016.250,00	31.308.900,00	-11.363.200,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		1 Laporan	24.987.150,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	97.500.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-37.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang		1 Laporan	44.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA

													Kecamatan, Semua Kel/Desa			bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				A DAERAH
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	58.488.600,00	24.083.100,00	24.083.100,00	-34.405.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		1 Laporan	13.400.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	979.496.640,00	600.597.120,00	592.597.120,00	-386.899.520,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		1 Laporan	511.600.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah objek aset yang dikelola Jumlah total nilai aset				20 Miliar 500 Objek	20 Miliar 500 Objek	121.233.000,00	71.933.000,00	37.833.000,00	-83.400.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel	BPBD	20 M 500 Objek	29.849.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	106.150.000,00	67.950.000,00	33.850.000,00	-72.300.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		6 Unit	21.475.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	3.983.000,00	3.983.000,00	3.983.000,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		1 Unit	8.374.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	11.100.000,00	0,00	0,00	-11.100.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel		1 Unit	0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				34 Unit	34 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCA DAERAH
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCA DAERAH

																Pelayanan Publik yang bersih, transparan dan akuntabel				
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana Persentase daerah pascabencana yang mendapatkan penanganan rehabilitasi Rekonstruksi Persentase Jumlah korban berhasil di cari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana				65 85 90 % %	65 85 90 % %	911.494.400,00	678.992.300,00	518.070.900,00	3.710.665.878,00						100% 100% 100% 100% 100%	609.115.850,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang terpantau dan tersebar luasnya informasi potensi bencana				103 Nagari	103 Nagari	0,00	0,00	0,00	0,00			-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar	asyarakat	103 Nagari	5.090.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				80000 Orang	80000 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar		80000 Orang	5.090.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar				BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah nagari yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				15 Nagari	15 Nagari	408.989.000,00	212.488.900,00	208.592.500,00	-200.396.500,00			-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar	asyarakat	100% 100%	413.502.250,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				10 Unit	10 Unit	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				1 Kawasan	1 Kawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				21 Orang	21 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan				1 laporan	1 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA

			yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya										Kecamatan, Semua Kel/Desa			6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar				A DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	8.989.100,00	8.989.100,00	5.090.100,00	-3.899.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar		1 Dokumen	10.002.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				1 Kawasan	1 Kawasan	399.999.900,00	199.999.800,00	200.002.400,00	-199.997.500,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAN YANG BIDANG PENDIDIKAN	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar		400 Orang	400.000.250,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Ditangani Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan dalam keadaan baik				1000 Orang 100 Unit	1000 Orang 100 Unit	442.505.400,00	226.503.400,00	111.478.400,00	-331.027.000,00			-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar	asyarakat	100 Unit 1000 Orang	160.213.600,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				400 Orang	400 Orang	427.504.000,00	211.502.000,00	98.577.000,00	-328.927.000,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar		400 Orang	150.206.400,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi				370 Orang	370 Orang	15.001.400,00	15.001.400,00	12.901.400,00	-2.100.000,00	Kab. Padang Pariaman	DANA ALOKASI	-	6. Peningkatan kualitas		370 Orang	10.007.200,00	BADAN PENANGGU

			Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										an, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	UMUM (DAU)		pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar				LANGAN BENCAN A DAERAH	
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit																			
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCAN A DAERAH	
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCAN A DAERAH	
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen data kerusakan dan kerugian pascabencana Jumlah Dokumen Pemulihan Kondisi Fisik dan Non Fisik Penanggulangan Pasca Bencana Jumlah dokumen penanggulangan pra bencana				1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen	60.000.000,00	240.000.000,00	198.000.000,00	138.000.000,00			-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar	asyarakat	1 Dokumen 100 % 1 Dokumen	30.310.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCAN A DAERAH	
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCAN A DAERAH	
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCAN A DAERAH	
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																			
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCAN A DAERAH	
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																			

			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Lapora n	1 Lapora n	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar			0,00	BADAN PENANG GU LANGAN BENCAN A DAERAH
1.05.03.2.04. 0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	60.000.000,00	240.000.000,00	198.000.000,00	138.000.000,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar		1 Kegiatan	30.310.000,0 0	BADAN PENANG GU LANGAN BENCAN A DAERAH
1.05.03.2.04. 0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal				1 Lemba ga	1 Lemba ga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar			0,00	BADAN PENANG GU LANGAN BENCAN A DAERAH
1.05.03.2.04. 0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokum en	1 Dokum en	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar			0,00	BADAN PENANG GU LANGAN BENCAN A DAERAH
1.05.03.2.04. 0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																			
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokum en	1 Dokum en	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Padang Pariam an, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar 6. Peningkatan kualitas pelayanan dasar			0,00	BADAN PENANG GU LANGAN BENCAN A DAERAH
	J U M L A H								6.415.299.247,00	6.468.976.705,00	6.062.252.155,00	23.466.557.115, 86							5.662.022.48 0,00	

BAB V

PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Tahun 2025 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, Badan perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Badan harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan Badan dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di Badan ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Badan diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, Badan perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu Badan menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan Dinas yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Padang Pariaman

20 Oktober 2025

Kepala Pelaksana
BPBD Kab. Padang Pariaman



EMRI NURMAN, S.STP., MM
NIP. 19790601 199810 1 001

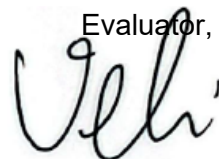
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 - 2029	
2.	Renstra Priode 2025 - 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	✓
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(VELIA YOLANDA, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	